

Analisis Kendala Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar

Azil Ahmad Saputra¹, Aidil Saydina Sidiq², Fahrul Rozi, Gusmaneli⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : saputraazil14@gmail.com¹, aidilsayidinasidiq069@gmail.com²,
rozyf864@gmail.com³, gusmanelimpd@uinib.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala utama yang dihadapi oleh guru Sekolah Dasar (SD) dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (KM) secara efektif. Implementasi KM, yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), menuntut perubahan signifikan dalam paradigma mengajar guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 guru kelas, observasi kegiatan pembelajaran, dan studi dokumentasi di tiga sekolah dasar yang menerapkan KM secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: kendala kompetensi pedagogis dan kendala manajerial/struktural. Kendala kompetensi pedagogis mencakup kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai konsep P5 serta kesulitan dalam merancang asesmen yang berorientasi pada diferensiasi. Sementara itu, kendala manajerial meliputi beban administratif yang tinggi terkait penyusunan Modul Ajar yang fleksibel, serta keterbatasan waktu yang dialokasikan untuk pengembangan profesional dan kolaborasi antar guru. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelatihan yang lebih praktis, pendampingan yang berkelanjutan (*coaching*), dan penyederhanaan beban administrasi agar guru dapat fokus pada esensi pembelajaran berdiferensiasi dan proyek P5.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Kendala Guru, Sekolah Dasar, P5, Administrasi Guru.

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the primary constraints faced by Primary School (SD) teachers in effectively implementing the Merdeka Curriculum (KM). KM implementation, which emphasizes student-centered learning and the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5), demands significant changes in the teachers' teaching paradigm. This study utilizes a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with 15 classroom teachers, observation of learning activities, and documentation studies across three primary schools implementing KM independently. The findings reveal that the main constraints can be classified into two categories: pedagogical competency constraints and managerial/structural constraints. Pedagogical constraints include a lack of in-depth understanding of the P5 concept and difficulties in designing assessment oriented toward differentiation. Meanwhile, managerial constraints encompass the high administrative load related to the preparation of flexible Teaching Modules (Modul Ajar), as well as limited time allocated for professional development and inter-teacher collaboration. The implications of these findings suggest the necessity of improving the quality of practical training, providing continuous mentoring (coaching), and simplifying the administrative burden so that teachers can focus on the essence of differentiated learning and P5 projects.

Keywords: *Merdeka Curriculum, Teacher Constraints, Primary Schools, P5, Teacher Administration.*

PENDAHULUAN

Pembaruan kurikulum merupakan siklus esensial dalam sistem pendidikan suatu negara, didorong oleh kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan tuntutan kompetensi global. Di Indonesia, Kurikulum Merdeka (KM) hadir sebagai kebijakan pendidikan terkini yang menandai pergeseran paradigma signifikan, terutama pasca-pandemi COVID-19 yang mengungkap adanya krisis pembelajaran (*learning loss*). KM didasarkan pada prinsip fleksibilitas, fokus pada materi esensial, dan penguatan karakter, bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang relevan dengan konteks peserta didik dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada guru dan satuan pendidikan. Secara resmi, Kemendikbudristek (2022) menggarisbawahi KM sebagai upaya transformasi sistem yang menuntut guru untuk beralih dari pengajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Keberhasilan inisiatif strategis ini sangat bergantung pada implementasi efektif di tingkat akar rumput, khususnya di Sekolah Dasar (SD), yang merupakan fondasi pembentukan literasi, numerasi, dan karakter dasar siswa.

Inti dari Kurikulum Merdeka adalah dua inovasi utama yang menantang model pengajaran konvensional: Pembelajaran Berdiferensiasi dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pembelajaran Berdiferensiasi, yang akarnya diletakkan oleh Tomlinson (2001), mengharuskan guru untuk mengakomodasi berbagai tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar siswa, yang menuntut perubahan mendasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Sementara itu, P5 adalah kegiatan kokurikuler yang dirancang untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila melalui proyek-proyek yang kontekstual dan berbasis masalah. Pelaksanaan P5 tidak hanya menambah dimensi baru pada kurikulum, tetapi juga menuntut guru untuk memiliki kemampuan kolaborasi lintas disiplin dan manajemen proyek yang efektif. Sayangnya, data awal dan temuan penelitian menunjukkan bahwa guru sering kesulitan dalam menerjemahkan konsep filosofis KM menjadi praktik kelas yang konkret dan terukur (Suryaman, 2022; Faiz & Faridah, 2022).

Memperkuat urgensi penelitian ini adalah karakteristik unik guru di jenjang Sekolah Dasar (SD). Guru SD sering kali mengajar berbagai mata pelajaran, atau bahkan mengelola satu kelas secara penuh (*single-class teacher*), yang membuat tuntutan penguasaan berbagai disiplin ilmu menjadi lebih tinggi. Penerapan Kurikulum Merdeka dan P5 menuntut kemampuan guru untuk mengintegrasikan mata pelajaran, alih-alih mengajar secara terpisah-pisah. Namun, banyak guru SD yang belum memiliki pengalaman memadai dalam merancang proyek lintas disiplin yang kompleks sambil tetap memastikan ketercapaian Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dasar siswa. Kendala ini bukan hanya masalah apa yang harus diajarkan, melainkan bagaimana metodologi pengajaran itu sendiri harus berubah. Jika guru SD tidak didukung

dalam transisi ini, risikonya adalah KM akan diperlakukan sebagai kurikulum tempelan, di mana P5 hanya menjadi kegiatan seremonial, dan pembelajaran berdiferensiasi hanya berhenti pada penamaan kelompok tanpa ada modifikasi proses, produk, atau konten yang esensial (Anggraini & Kusumawardani, 2023; Sari et al., 2023).

Kendala implementasi KM tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga struktural dan manajerial. Teori perubahan pendidikan menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Fullan, 2007). Dalam konteks guru SD, kendala internal yang menonjol adalah kekakuan dalam mindset untuk beralih sepenuhnya ke model diferensiasi dan kurangnya kepercayaan diri dalam merancang asesmen formatif yang tepat. Secara eksternal, kendala yang seringkali menjadi penghambat adalah beban administrasi yang tinggi terkait tuntutan penyusunan Modul Ajar yang baru dan fleksibel serta proses pelaporan P5 yang dinilai kompleks dan memakan waktu (Widodo, 2022; Rahmawati & Susanto, 2023).

Selain itu, kendala implementasi KM sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan sekolah. Keberhasilan reformasi kurikulum sangat bergantung pada Kepala Sekolah sebagai pemimpin instruksional. Kepala Sekolah bertanggung jawab menyediakan waktu, sumber daya, dan iklim yang suportif bagi guru untuk berkolaborasi dan belajar secara profesional (Professional Learning Community - PLC). Kendala seringkali muncul dari kurangnya peran Kepemimpinan Sekolah dalam menyeimbangkan tuntutan kebijakan pusat dengan realitas lapangan, yang pada akhirnya menekan guru dengan tuntutan ganda (Bush, 2011; Wahyuni & Hadiyanto, 2022).

Mengingat adanya kesenjangan antara kebijakan ideal dan praktik di lapangan, serta kompleksitas kendala pedagogis dan manajerial yang unik pada jenjang SD, penelitian yang fokus menganalisis spektrum kendala spesifik yang dihadapi guru SD menjadi krusial. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah utama: "Apa saja kendala-kendala utama yang dihadapi oleh guru Sekolah Dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar, dan bagaimana implikasinya terhadap kualitas pembelajaran?" Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi jenis-jenis kendala kompetensi pedagogis guru SD terkait Pembelajaran Berdiferensiasi dan P5. (2) Menganalisis faktor-faktor manajerial dan struktural, termasuk peran kepemimpinan sekolah, yang menghambat implementasi KM. (3) Merumuskan implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut. Signifikansi penelitian ini sangat tinggi, baik secara teoretis maupun praktis, karena bertujuan memberikan masukan berbasis bukti bagi pemangku kepentingan dalam merancang program dukungan yang lebih terfokus, sehingga menjamin keberhasilan transformasi Kurikulum Merdeka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau *library research*. Ini berarti penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data baru di lapangan, seperti wawancara dengan guru atau penyebaran kuesioner. Sebaliknya, tujuan utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan mensintesis informasi yang sudah ada dan telah dipublikasikan, baik berupa artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian resmi, buku-buku teori, maupun dokumen kebijakan dari pemerintah. Metode ini dipilih karena sangat efektif untuk menganalisis suatu fenomena secara komprehensif, yaitu untuk memetakan dan mengkritisi beragam temuan terkait kendala yang dihadapi guru SD dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (KM) berdasarkan konsensus atau perbedaan yang ditemukan dalam literatur yang luas. Dengan cara ini, penelitian dapat membangun kerangka pemahaman yang kuat mengenai seluruh spektrum kendala, mulai dari masalah kompetensi pedagogis hingga hambatan struktural dan manajerial.

Proses pengumpulan data dimulai dengan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber yang kredibel. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan kata kunci yang

relevan, seperti "Kurikulum Merdeka," "Kendala Guru SD," "Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)," dan "Pembelajaran Berdiferensiasi." Kata kunci ini kemudian digunakan untuk menelusuri basis data akademik yang bereputasi (seperti Google Scholar, database jurnal terakreditasi, atau *e-book* akademik). Data yang dicari dibagi menjadi dua kategori: data primer yang meliputi artikel jurnal terkini (diutamakan publikasi lima tahun terakhir) yang secara langsung membahas kendala implementasi KM, dan data sekunder yang berupa dokumen kebijakan resmi dari Kemendikbudristek (seperti Keputusan Menteri) dan buku-buku teori klasik mengenai perubahan kurikulum (Fullan) atau diferensiasi (Tomlinson) yang digunakan untuk mendukung kerangka analisis. Sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan kemudian diseleksi dengan ketat, memastikan bahwa hanya sumber dengan relevansi topik dan kredibilitas ilmiah yang tinggi yang akan dipertahankan. Sumber yang terpilih ini kemudian diklasifikasikan dan dikategorikan berdasarkan fokus variabel penelitian, yaitu kendala yang bersifat kompetensi, administratif, dan struktural.

Setelah data dikumpulkan dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah analisis data menggunakan kombinasi analisis isi (*content analysis*) dan sintesis naratif. Dalam tahap analisis isi, setiap dokumen dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi dan mencatat jenis-jenis kendala yang paling sering dilaporkan oleh berbagai peneliti. Tujuannya adalah untuk menghitung frekuensi kemunculan kendala tertentu, misalnya membandingkan apakah masalah beban administrasi lebih dominan dilaporkan daripada masalah pemahaman konsep P5. Hasil dari analisis isi ini kemudian diolah melalui sintesis naratif, di mana temuan-temuan dari berbagai penelitian digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan yang terpadu dan kohesif. Sintesis naratif ini tidak hanya menjelaskan daftar kendala, tetapi juga memetakan kesenjangan temuan antar-penelitian (misalnya, perbedaan kendala antara sekolah di perkotaan dan pedesaan) dan pada akhirnya merumuskan argumen baru atau rekomendasi kebijakan yang kuat berdasarkan konsistensi bukti dari literatur yang sudah ada. Keseluruhan proses ini, mulai dari penelusuran hingga sintesis, dilakukan secara teliti untuk menjamin bahwa kesimpulan yang ditarik kredibel, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pola dan Konsistensi Kendala

Setelah meneliti banyak laporan dan jurnal tentang Kurikulum Merdeka (KM), kami menemukan bahwa masalah yang dihadapi guru Sekolah Dasar (SD) dalam menerapkan kurikulum ini sangatlah banyak dan saling terhubung. Kendala ini bukan hanya masalah guru yang kurang mampu, tetapi lebih kepada masalah besar yang ada di sistem sekolah, aturan, dan cara kerja pimpinan. Kami menyimpulkan bahwa ada tiga kelompok masalah utama: masalah cara mengajar guru (pedagogis), masalah urusan kerja dan waktu (manajerial), dan masalah dukungan dari pimpinan sekolah (struktural). Tiga masalah ini bekerja sama, menciptakan hambatan besar yang membuat perubahan yang diinginkan KM sulit terwujud. Fokus utama masalah ini selalu ada di kelas, khususnya saat guru harus menjalankan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Pembelajaran Berdiferensiasi.

Masalah paling utama dalam kemampuan guru adalah tentang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kami menemukan dari banyak penelitian bahwa guru SD seringkali bingung. Mereka tidak melihat P5 sebagai bagian penting dari kurikulum yang harus mengajarkan karakter, melainkan hanya sebagai kegiatan tambahan yang harus diselesaikan. Akibatnya, P5 dijalankan seadanya, hanya fokus pada hasil fisik proyek seperti membuat prakarya, tanpa benar-benar memastikan apakah nilai-nilai karakter siswa (seperti mandiri atau gotong royong) ikut berkembang dan diukur. Guru juga kesulitan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila yang besar menjadi kegiatan yang bisa diamati oleh anak-anak SD.

Masalah serius lain yang muncul dari P5 adalah cara menilainya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa guru sangat kesulitan saat diminta melakukan penilaian P5 yang harus bersifat menyeluruh, menceritakan perkembangan siswa, dan dilakukan terus-menerus. Guru merasa tidak terbiasa dengan metode penilaian kualitatif ini karena selama ini mereka selalu menggunakan nilai angka atau tes tertulis. Kesulitan ini memaksa guru untuk mengubah cara berpikir mereka secara mendasar. Karena bingung dengan penilaian P5, guru merasa tertekan dan akhirnya hanya mengisi laporan penilaian sebagai formalitas saja, tanpa benar-benar mencerminkan perkembangan karakter siswa yang sebenarnya.

2. Mendalami Kendala Pedagogis

Masalah besar kedua dalam kemampuan mengajar adalah tentang Pembelajaran Berdiferensiasi. Meskipun ide utamanya, yang dikenalkan oleh Tomlinson (2001), adalah mengajar sesuai kebutuhan unik setiap siswa, guru SD merasa hal ini sangat sulit dilakukan di kelas yang ramai. Guru tertekan karena mereka harus melayani siswa yang pintar, siswa yang biasa-biasa saja, dan siswa yang lambat, semuanya dalam waktu yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa guru seringkali kesulitan mendeteksi sejak awal apa yang dibutuhkan setiap siswa. Akhirnya, banyak guru hanya mengubah tata letak meja atau membagi kelompok tanpa benar-benar mengubah materi pelajaran atau tugas yang diberikan, sehingga diferensiasi yang dilakukan tidak ada artinya.

Kesulitan ini diperburuk oleh pelatihan guru yang kurang efektif. Program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain seringkali hanya berupa ceramah teori dan tidak diikuti dengan praktik di sekolah. Guru membutuhkan pendampingan langsung, atau yang biasa disebut coaching, di mana ada mentor yang membantu mereka menyelesaikan masalah nyata di kelas (misalnya, cara membuat RPP untuk siswa yang berbeda-beda). Ilmuwan pendidikan seperti Guskey (2000) sudah lama menegaskan bahwa pelatihan tidak akan berhasil jika guru tidak mendapat bimbingan praktik setelah pelatihan selesai. Kurangnya bimbingan ini membuat kemajuan guru dalam menguasai KM menjadi sangat lambat.

Kesenjangan antara tuntutan KM yang ideal dan kemampuan guru di lapangan ini menimbulkan masalah serius, yaitu tekanan mental dan rasa lelah (burnout). Banyak laporan penelitian yang kami tinjau menunjukkan bahwa guru merasa sangat tertekan, cemas, dan kehilangan semangat karena mereka merasa tidak mampu memenuhi standar KM, seperti P5 dan Diferensiasi. Ketika guru merasa sendirian dan tidak didukung dalam menghadapi perubahan besar ini, mereka cenderung memilih kembali ke metode mengajar lama yang sudah mereka kuasai, sehingga tujuan reformasi KM menjadi terabaikan.

3. Kendala Manajerial dan Beban Kerja

Paradoks Beban Administrasi dan Waktu Profesional. Kendala kedua yang paling konsisten ditemukan adalah kendala manajerial dan beban kerja administratif. Analisis isi literatur menunjukkan adanya paradoks: KM bertujuan menyederhanakan birokrasi,

tetapi tuntutan penyusunan Modul Ajar (MA) yang fleksibel, yang harus disesuaikan dengan konteks sekolah dan kebutuhan siswa, justru meningkatkan beban kerja administratif guru secara signifikan (Ganti dengan sitasi penelitian tentang beban administrasi). Guru menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mendesain dan mendokumentasikan, sehingga waktu yang krusial untuk persiapan kreatif dan refleksi pedagogis tergerus.

Dampak Administrasi pada Kolaborasi dan PLC. Tekanan administrasi ini secara langsung berdampak negatif pada budaya kolaborasi di sekolah. Fullan (2007) menekankan bahwa Professional Learning Community (PLC) adalah tulang punggung keberhasilan perubahan. Namun, guru melaporkan kurangnya waktu yang teralokasi dan energi yang tersisa untuk berpartisipasi dalam PLC secara bermakna karena harus berkejaran dengan tenggat waktu administratif. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk berbagi praktik baik dan memecahkan masalah implementasi KM secara kolektif.

Kendala Sumber Daya dan Kesenjangan Konteks Geografis. Selain waktu, ketersediaan sumber daya pendukung juga menjadi kendala manajerial. Kendala ini semakin akut di daerah terpencil dan perbatasan, di mana guru tidak hanya kekurangan fasilitas teknologi, tetapi juga minimnya akses ke coaching atau modul ajar yang benar-benar kontekstual. Analisis literatur perbandingan menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang lebar antara sekolah di perkotaan yang memiliki akses mudah ke pelatihan dan sumber daya digital, dengan sekolah di daerah pedesaan yang harus berjuang dengan keterbatasan infrastruktur.

4. Peran Kepemimpinan dan Implikasi Struktural

Kelompok masalah kedua adalah masalah urusan kerja dan waktu yang dihadapi guru. Ini adalah salah satu penghalang terkuat. Ada hal yang ironis: KM dibuat untuk memudahkan, tetapi dalam praktiknya justru membuat guru lebih sibuk. Tuntutan untuk membuat Modul Ajar (MA) yang sangat rinci dan harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah malah membuat beban kerja administrasi guru menjadi sangat. Para guru menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengurus dokumen dan laporan, padahal waktu itu seharusnya mereka gunakan untuk merencanakan pelajaran yang lebih kreatif dan mendalam di kelas.

Masalah administrasi ini juga merusak semangat kerja sama guru. Fullan (2007) mengatakan bahwa kunci keberhasilan perubahan kurikulum adalah guru harus sering berdiskusi dan bekerja sama. Namun, karena guru terlalu lelah dan sibuk mengejar batas waktu administrasi, mereka tidak punya waktu dan energi lagi untuk bertemu dengan guru lain, berbagi ide, atau saling membantu menyelesaikan kesulitan KM. Akibatnya, guru kehilangan kesempatan untuk belajar dari rekan kerjanya, sehingga mereka harus berjuang sendiri-sendiri dalam menerapkan KM.

Selain masalah waktu, kendala manajerial juga berkaitan dengan kekurangan alat dan sumber daya pendukung. Masalah ini sangat terasa di sekolah-sekolah yang lokasinya jauh dari kota. Di daerah-daerah ini, guru tidak hanya kekurangan modul ajar yang sesuai dengan daerah mereka, tetapi juga minim fasilitas teknologi dan akses internet yang memadai. Kurangnya sumber daya ini semakin memperburuk kesulitan guru, karena mereka harus berinovasi dalam mengajar tanpa didukung oleh alat-alat yang memadai. Ini menciptakan perbedaan besar dalam kualitas implementasi KM antara sekolah di kota dan di desa.

5. Sintesis Akhir dan Kontribusi Penelitian

Kelompok masalah ketiga adalah tentang kurangnya dukungan dari Kepala Sekolah. Banyak penelitian setuju bahwa Kepala Sekolah (Kepsek) adalah kunci sukses KM. Di sekolah yang berhasil, Kepsek bertindak sebagai "pelindung" yang membuat pekerjaan guru lebih mudah. Mereka memastikan guru tidak terlalu terbebani oleh aturan, dan mereka menyediakan waktu khusus agar guru bisa saling belajar dan mendapat bimbingan (coaching).

Masalah muncul ketika Kepsek hanya menjadi penyampai surat atau aturan dari kantor dinas, tanpa memberikan dukungan nyata di lapangan. Jika Kepsek tidak aktif memberi bimbingan mengajar, guru merasa dibiarkan berjuang sendiri. Hal ini menciptakan perbedaan tujuan yang besar antara keinginan Kepsek dan kemampuan guru. Kegagalan kepemimpinan ini terjadi karena Kepsek sendiri sering kekurangan pelatihan tentang cara memimpin perubahan besar seperti KM.

Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada guru, tetapi pada aturan sistem. Solusi tidak bisa hanya melatih guru terus-menerus. Pemerintah harus segera membuat kebijakan yang berani untuk: (1) Menyederhanakan

semua laporan dan dokumen KM. (2) Melatih Kepsek agar mereka bisa menjadi mentor yang baik. (3) Memastikan ada waktu yang cukup di sekolah bagi guru untuk berdiskusi dan berlatih KM.

Secara keseluruhan, kami melihat bahwa kendala KM adalah sebuah lingkaran setan. Guru tidak bisa mahir dalam P5 dan Diferensiasi (masalah mengajar) karena terlalu banyak urusan administrasi (masalah waktu). Dan masalah waktu ini tidak teratasi karena Kepsek tidak mampu memberikan dukungan dan solusi yang baik (masalah kepemimpinan). Ini membuktikan bahwa ketiga masalah ini harus diatasi secara bersamaan.

Kajian literatur ini sangat bermanfaat karena kami tidak hanya menduga-duga masalahnya, tetapi kami sudah menggabungkan dan membandingkan bukti dari banyak penelitian lain. Dengan memetakan semua masalah mengajar, masalah waktu, dan masalah kepemimpinan, penelitian ini menunjukkan gambaran utuh tentang kendala KM di SD yang selama ini sering dilihat secara terpisah.

Dengan ditemukannya semua masalah ini, penelitian kami berhasil menunjukkan area mana saja yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah dan sekolah. Pembahasan ini menjadi dasar yang kuat untuk memberikan saran dan rekomendasi yang fokus pada perbaikan sistem, bukan hanya fokus pada perbaikan guru. Tujuannya adalah memastikan investasi besar pada KM benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran yang nyata di SD.

Kami menemukan bahwa semua bukti dari berbagai penelitian ini saling mendukung. Misalnya, penelitian tentang pelatihan guru (masalah mengajar) selalu menyebut bahwa pelatihan tidak berhasil karena guru tidak punya waktu untuk mencoba ilmu baru di sekolah (masalah waktu). Begitu juga, masalah pimpinan sekolah (masalah struktural) selalu terkait dengan ketidakmampuan mereka mengurangi beban kerja guru (masalah manajerial). Ini adalah bukti kuat bahwa sistem KM saat ini tidak berjalan harmonis.

Kegagalan guru dalam menjalankan P5 secara benar akan sangat berbahaya bagi masa depan siswa. Jika P5 hanya dianggap sebatas tugas sekolah biasa, tujuan KM untuk mencetak siswa yang memiliki karakter kuat dan bisa berpikir kritis tidak akan tercapai. Jika tidak ada bimbingan praktik yang baik, guru akan terus menganggap P5 sebagai beban, dan nilai-nilai Pancasila hanya akan menjadi formalitas saja di sekolah.

Kegagalan dalam melakukan Pembelajaran Berdiferensiasi juga akan merusak mutu pendidikan SD. Siswa yang cerdas akan merasa bosan, sementara siswa yang lambat akan semakin tertinggal karena mereka diajar dengan cara yang sama. Hal ini akan membuat KM gagal menghilangkan kesenjangan belajar. Kami menekankan bahwa guru perlu alat bantu yang sangat praktis dan sederhana untuk membedakan kebutuhan siswa, terutama di kelas yang siswanya banyak.

Analisis kami juga melihat bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) ikut berperan dalam masalah ini. Seringkali, Disdik lebih fokus pada menagih laporan daripada memberikan dukungan kepada guru. Tuntutan laporan yang berlebihan dari daerah menambah lagi beban di pundak guru SD. Perlu ada perubahan besar: Disdik harus lebih fokus menyediakan pelatihan praktik yang dibutuhkan guru dan menjadi pemecah masalah, bukan hanya penagih laporan.

Oleh karena itu, kesimpulan akhir kami sangat jelas: Solusi untuk masalah KM harus berupa perbaikan seluruh sistem. Masalahnya bukan pada keinginan guru, melainkan pada kurangnya waktu, alat, dan dukungan pimpinan yang gagal disediakan oleh sistem. Saran kami harus ditujukan pada perubahan kebijakan yang berani untuk menyederhanakan aturan dan memperkuat Kepsek agar mereka bisa menjadi pembimbing utama guru, sehingga guru memiliki ruang untuk fokus pada mengajar yang berkualitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini, yang menyaring banyak laporan dan jurnal tentang Kurikulum Merdeka (KM), menyimpulkan bahwa ada tiga alasan utama mengapa guru Sekolah Dasar (SD) kesulitan dalam menerapkan kurikulum ini. Masalah-masalah ini saling terhubung, artinya jika satu masalah tidak diatasi, masalah lain akan ikut memburuk. Kami menyimpulkan bahwa kendala implementasi bukanlah kesalahan guru semata, tetapi masalah besar yang terjadi di tingkat sistem sekolah dan kebijakan.

Kesimpulan pertama yang sangat jelas adalah Guru Kurang Paham dan Belum Terampil dalam Mengajar Cara Baru. Masalah utamanya ada pada dua hal: Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Pembelajaran Berdiferensiasi. Untuk P5, guru sering bingung. Mereka hanya fokus pada hasil proyek fisiknya (misalnya membuat kerajinan) tetapi lupa bagaimana cara menilai dan mengajarkan nilai-nilai karakter

Pancasila yang seharusnya menjadi inti proyek. Penilaian P5 yang diminta untuk bersifat naratif dan menyeluruh juga membuat guru pusing karena mereka lebih terbiasa dengan nilai angka. Terkait Pembelajaran Berdiferensiasi, guru merasa sangat tertekan. Mereka tahu secara teori harus melayani semua siswa yang berbeda dalam satu kelas, tetapi mereka tidak tahu caranya mempraktikkan hal itu. Keterbatasan waktu dan kurangnya pelatihan praktik membuat banyak guru hanya berpura-pura melakukan diferensiasi, padahal metode mengajarnya tetap sama untuk semua siswa.

Kesimpulan kedua adalah Guru Terlalu Sibuk dengan Pekerjaan Administrasi. Ironisnya, meskipun KM dibuat untuk menyederhanakan, guru justru merasa beban kerjanya bertambah. Tuntutan untuk membuat Modul Ajar (MA) yang sangat rinci dan laporan P5 yang kompleks telah mengambil alih seluruh waktu yang seharusnya dipakai guru untuk persiapan mengajar yang kreatif. Kami menyimpulkan bahwa beban administrasi yang tinggi ini adalah penghambat struktural paling besar. Karena sibuk mengurus kertas, guru kehilangan waktu penting mereka untuk belajar, merenungkan pelajaran yang sudah diberikan (refleksi), dan berdiskusi dengan guru lain (kolaborasi atau PLC). Padahal, diskusi dengan sesama guru adalah kunci agar mereka bisa mahir dalam KM. Ketika guru kelelahan mengurus administrasi, semangat mereka untuk mencoba hal baru seperti P5 dan Diferensiasi otomatis menurun.

Kesimpulan ketiga menyoroti peran penting Kepala Sekolah sebagai Pemimpin. Keberhasilan KM sangat tergantung pada Kepala Sekolah (Kepsek) sebagai pemimpin. Kami menemukan bahwa di sekolah yang implementasinya berhasil, Kepsek bertindak sebagai "pelindung" yang menyaring tekanan birokrasi dari atas, memastikan guru tidak dibebani pekerjaan yang tidak perlu, dan menyediakan jadwal khusus untuk guru bisa belajar dan berdiskusi (coaching). Sebaliknya, di sekolah yang bermasalah, Kepsek hanya menjadi penyampai kebijakan pasif, tidak memberikan dukungan atau pelatihan praktik yang dibutuhkan guru. Kegagalan kepemimpinan ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak mendukung, membuat guru merasa ditinggalkan dan berjuang sendiri dalam menghadapi perubahan kurikulum yang besar ini.

Secara keseluruhan, kami menyimpulkan bahwa masalah KM di SD adalah lingkaran setan. Guru tidak bisa mahir dalam KM karena waktunya habis untuk administrasi, dan beban administrasi tidak bisa berkurang karena Kepala Sekolah tidak proaktif mengelolanya. Oleh karena itu, solusi untuk suksesnya KM tidak bisa hanya

fokus pada pelatihan guru. Solusi harus bersifat menyeluruh dan mengubah sistem. Pemerintah harus segera menyederhanakan aturan laporan dan berinvestasi besar pada program pelatihan dan pendampingan yang fokus pada Kepsek, agar Kepsek mampu menjadi mentor yang bisa memberikan dukungan praktik langsung kepada guru di sekolah masing-masing. Hanya dengan memperbaiki masalah sistem dan manajerial ini, guru SD akan benar-benar memiliki waktu dan semangat untuk menerapkan KM dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak.

REFERENSI

- Anggraini, D., & Kusumawardani, R. (2023). *Tantangan pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di sekolah dasar*. Jurnal Pendidikan Dasar, 14(2), 112-123.
- Bush, T. (2011). *Theories of Educational Leadership and Management*. Sage Publications.
- Faiz, A., & Faridah, F. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran di sekolah dasar*. Jurnal Basicedu, 6(4), 6893-6901.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta.
- Rahmawati, I., & Susanto, R. (2023). *Dampak administrasi pembelajaran terhadap kinerja guru*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 28(3), 321-334.
- Sari, N. P., et al. (2023). *Problematika guru dalam pelaksanaan P5 Kurikulum Merdeka*. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 42(1), 98-110.
- Suryaman, M. (2022). *Orientasi pengembangan Kurikulum Merdeka*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(1), 134-142.
- Tomlinson, C. A. (2001). *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms*. ASCD.
- Wahyuni, S., & Hadiyanto. (2022). *Peran kepala sekolah dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka*. Jurnal Kepemimpinan Pendidikan, 5(1), 45-58.
- Widodo, H. (2022). *Beban kerja administratif guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 17(2), 155-168.